

**EVALUASI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH (BPKBMD)
KOTA BITUNG**

*EVALUATION OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN FINANCIAL
MANAGEMENT BOARD AND REGIONAL PROPERTY (BPKBMD) BITUNG*

Oleh:

**Mega F. Syahril¹
Ventje Ilat²**

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹syahril.mega.ms@gmail.com

Abstrak: Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input, efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung telah dilakukan Efektif dan Efisien. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan pedoman penilaian pengelolaan keuangan daerah pada BPKBMD Kota Bitung secara keseluruhan, Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah BPKBMD Kota Bitung dari tahun 2012-2015 rata-rata diatas 100%, hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah BPKBMD Kota Bitung sangat efektif. Hasil pengukuran tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah BPKBMD Kota Bitung dengan menggunakan rumus rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah BPKBMD Kota Bitung dari tahun 2012-2015 kurang efisien. Hal ini dikarenakan pengeluaran daerah masih tinggi dibandingkan total penerimaan daerah. Pengeluaran yang tertinggi berdasarkan hasil penelitian terjadi pada tahun 2015.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, Daerah.

Abstract: Public sector performance measurement is a system that aims to help public managers assess the achievement of a strategy through financial and nonfinancial measuring instrument. Efficiency is the ratio between output to input, effectiveness generally corresponds to a measure of the ability to achieve certain goals. The results of this study aims to evaluate whether the financial management in the Financial Management Board and Regional Property (BPKBMD) Bitung City has done an Effective and Efficient. The method used is descriptive analysis. The results based guidelines on the assessment of financial management overall in BPKBMD Bitung City Overall. The effectiveness of financial management BPKBMD Bitung city from year 2012 to 2015 on average above 100%, this means that the financial management BPKBMD Bitung city very effective. The results of the measurement of the level of efficiency of financial management BPKBMD Bitung city by using the formula given ratio and assessment using the assessment criteria, the level of efficiency of financial management BPKBMD Bitung City from 2012-2015 year is less efficient. This is because of regional spending still high compared to total regional revenues. The highest expenditure based on the results of the study occurred in 2015.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Financial Management, Region

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam hal ini pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang mengaturnya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pertama kali ditandai dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) No.22 Tahun 1999 yang di revisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat juga PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No.24 Tahun 2005 yang di revisi dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Darise 2009 dikutip dalam Tampanatu 2013). Tujuan utama serangkaian peraturan tersebut tidak hanya keinginan untuk membuat kewenangan pembiayaan pemerintah pusat kepada daerah, tetapi yang terpenting adalah keinginan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka efisiensi adalah berbanding antara keluaran (output) dengan masukan (input). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2011) akuntansi adalah system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk pengguna yang tertarik.

Adapun menurut Mahmudi (2011: 92) *Accounting Principle Board Statement* No.4 akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif

Akunansi Sektor Publik

Menurut Wiratna (2015:1) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan

Menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan memakai ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting Association, 1966 dalam Halim dan Kusufi, 2013:2).

Peran Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2011:16) Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2011:2) Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hariadi, et al. (2010:115) Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi. Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi non profit lainnya (Monir Mir dan Wahyu Sutiyono, 2013). Sektor publik, lingkungannya cukup kompleks meliputi multi entitas ekonomi dan legal yang beraneka ragam dengan latar belakangnya

Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dan Prinsip – prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan klient dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yang ada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsi sebagai public service maka persepsi aparatur pemerintah daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi aparatur pemerintah akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan begitu juga sebaliknya Santoso (2011).

Konsep Efisiensi

Rahardjo, (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Mengatakan bahwa efisiensi dapat dikatakan merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Konsep Efektifitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan (Manoppo, 2015).

Pengeluaran Pemerintah Dan Pengeluaran Rutin Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan pengeluaran pemerintah bersumber dari dana rupiah murni (Mahmudi 2011:230).

Pengeluaran rutin pemerintah adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum dan pelaksanaan pembangunan. Cosimo (2012) menyatakan bahwa beberapa hipotesis alternative keuangan pemerintah memiliki ciri hubungan antara pendapatan dan belanja yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah.

Penelitian Terdahulu

N Suoth (2016) dengan judul Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Mawengkang (2010) dengan judul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada provinsi Sulawesi Utara. Kindangen (2012) dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2014:13).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung dengan alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi No.45 Telp.(0438) 21006. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan gambaran umum dan permasalahan yang ada mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.
2. Mengumpulkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.
3. Menghitung efisiensi pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.
4. Menghitung efektivitas pengelola keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.
5. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.

Jenis Penelitian

Populasi digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industri Manufaktur yang bergerak dalam sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah delapan belas perusahaan atau emitem terdaftar. Sampel diperoleh dengan purposive sampling yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu, dan sesuai dengan penelitian yang dirancang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Ada 2 jenis data penelitian yaitu jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Jenis Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Sedangkan jenis data kuantitatif adalah data kerangka yang diperoleh melalui pengukuran. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu berupa Data Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti, yang berupa wawancara secara langsung mengenai objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber, yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mendatangi langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung kemudian melakukan :

1. Wawancara, dengan bertanya secara langsung pada pegawai juga pimpinan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta melalui rasio perbandingan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung dengan berlandaskan peraturan pemerintah yang berlaku.

Analisis Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk presentase.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber: *Mahmudi (2007)*

Analisis efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber: *Mahmudi (2007)*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kota Bitung terletak pada posisi geografis di antara 1° 23' 23" - 1° 35' 39" LU dan 125° 1' 43" - 125° 18' 13" BT dan luas wilayah daratan 304 km². Dan batas wilayahnya:

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara
- Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara
- Timur : Berbatasan dengan Laut Maluku

Penelitian ini akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat memperoleh data yang diperlukan yaitu dari Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Bitung. Dan data yang diambil adalah Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah dari tahun 2012-2015, Realisasi Belanja Rutin, Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Bitung dari tahun 2012-2015. Adapun realisasi pendapatan Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung dapat dilihat pada tabel 1 dari tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD)

No	Sumber Pendapatan	2012	2013	2014	2015
1.	PENDAPATAN	555.570.392.064.59	651.336.944.328.88	745.132.180.691.00	724.062.475.263.30
	Pendapatan Asli Daerah	38.435.120.911.59	55.173.113.990.88	83.520.151.103.00	106.133.530.054.30
	Pendapatan Pajak Daerah	17.723.643.955.00	26.162.693.540.00	33.493.759.019.00	37.360.100.054.30
	Pendapatan Retribusi Daerah	12.447.169.236.00	18.733.227.432.00	33.365.953.410.00	44.406.734.633.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.348.938.426.00	3.417.640.904.00	3.120.050.638.00	2.945.625.375.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.915.369.294.59	6.859.552.144.88	13.540.388.036.00	21.421.069.670.30
2	DANA PERIMBANGAN	440.111.231.759.00	492.770.558.386.00	550.441.543.914.00	503.702.709.603.30
	Bagi Hasil Pajak Dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.178.128.839.00	27.644.076.386.00	27.826.740.914.00	15.983.321.603.00
	Dana Alokasi Umum	379.300.339.000.00	421.672.562.000.00	469.745.053.000.00	437.048.958.000.00
	Dana Alokasi Khusus	33.009.510.000.00	43.453.920.000.00	52.869.750.000.00	50.670.430.000.00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	77.024.039.394.00	103.393.271.952.00	111.170.485.674.00	114.226.235.606.00
	Dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.181.430.394.00	22.924.490.952.00	29.114.068.674.00	29.016.483.606.00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.842.609.000.00	80.468.781.000.00	77.056.417.000.00	85.209.752.000.00
	Dana Intensif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	5.000.000.000.00	0.00

Sumber : Badan Pengelolah Keuangan, Dan Barang Milik Daerah Kota Bitung 2016

Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung Tahun 2012-2015

Tahun	Pengeluaran Rutin (Rp)	Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2012	538.645.556.037.00	555.570.392.064.59	96,95%
2013	611.429.465.168.49	651.336.944.328.88	93,87%
2014	716.727.700.397.00	745.132.180.691.00	96,18%
2015	756.178.490.437.00	724.062.475.263.30	104,43%

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 3. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung Tahun 2012-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2012	555.570.392.064.59	543.661.389.911.00	102,19%
2013	651.336.944.328.88	635.629.065.296.00	102,47%
2014	745.132.180.691.00	729.466.744.841.00	102,14%
2015	724.062.475.263.30	725.429.140.000.00	99,81%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari hasil perhitungan diatas, maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung pada tahun 2012 berada pada tingkat 96,95%, tahun 2013 berada pada tingkat 93,87%, tahun 2014 berada pada tingkat 96,18% , dan pada tahun 2015 berada

pada tingkat 104,43%. Dengan demikian dapat diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria kinerja keuangan maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung berada pada tingkat 90% keatas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung Kurang Efisien, Semakin besar nilai rasio efisiensi maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah pada BPKBMD Kota bitung hal ini menyangkut perbandingan output dan input pelaksanaan kegiatan/proyek. Semakin besar belanja artinya semakin besar input yang digunakan sementara kualitas output yang dihasilkan hanya mampu diukur dengan ukuran seberapa besar efek kegiatan/proyek tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Input yang terlampau besar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak sesuai dengan prinsip efisien dalam ekonomi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang baik dengan pengorbanan (biaya) yang sedikit.

Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung pada tahun 2012 berada pada tingkat 102,19%, tahun 2013 berada pada tingkat 102,47% , tahun 2014 berada pada tingkat 102,14% dan tahun 2015 berada pada tingkat 99,81%. Dengan demikian dapat diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria kinerja keuangan maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung berada pada tingkat rata-rata 100% keatas. Hal ini, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung adalah Sangat Efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut :

1. Berdasarkan hasil yang didapat dari pengukuran tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien. Hal ini dikarenakan pengeluaran daerah masih tinggi dibandingkan total penerimaan daerah. Semakin besar belanja artinya semakin besar input yang digunakan sementara kualitas output yang dihasilkan hanya mampu diukur dengan ukuran seberapa besar efek kegiatan/proyek tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Input yang terlampau besar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak sesuai dengan prinsip efisien dalam ekonomi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang baik dengan pengorbanan (biaya) yang sedikit.
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
3. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung dari tahun 2012-2015 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung sangat efektif.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka menghadapi otonomi daerah khususnya mempersiapkan sumber daya manusia, baiknya Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung dapat lebih mengatur penerimaan daerah agar bisa menyesuaikan dengan pengeluaran rutin sehingga pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung bisa diatur dan efisien.

2. Diupayakan peningkatan pertumbuhan Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung khususnya penerimaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat menampung pengeluaran daerah demi berbagai kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan aspirasinya.
3. Agar tingkat efektivitas terus dipertahankan seperti saat ini yaitu sangat efektif.
4. Disarankan kepada pembaca lain atau peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Cosimo Magazzino (2012). Revenue and Expenditure Nexus : A Case Study of ECOWAS. Economics Discussion Papers, No 2012-57, Kiel Institute for the World Economy. <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/20012-57>
- Darise, Nurian (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Indeks, Jakarta.
- Halim Abdul & Syam Kusufi, (2013). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Edisi ke 4 Jakarta. Salemba Empat
- Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, Bawono, Icut Rangga. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kindangen, Aranxta O. 2012. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi (Tidak dipublikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT
- Mir, Monir and Sutiyono, Wahyu. 2013, *Public Sector Financial Management Reform: A Case Study of Local Government Agencies in Indonesia*, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 7(4), 97-117. Available at: <http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol7/iss4/7>
- Mahmudi, 2011, *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*, Yogyakarta. UUI Press.10
- Mewengkang, Frangky 2010. *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi.
- Novlie Manoppo, 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol 17, No 2, ISSN 2303-1174 Hal 6-12. Akses 16 Januari 2016
- N Suoth, 2016, *Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Seatan*. Vol.4 No.1 ISSN 2303-1174, Hal. 613-622, maret 2016.
- Rahardjo, Adisasmita (2011), *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Santoso, Eko 2011. Dengan judul *Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi*, UNS-Pascasarjana Prodi. Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan - S4210075-2011 Akses 30 Agustus 2016.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2011). *Financial Accounting. (IFRS edition)*. The United State of America: John Wiley and Sons, Inc.

Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta

